

Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Biro Umum dan Keuangan

Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Hasil pengukuran kinerja Biro Umum dan Keuangan, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Biro Umum Triwulan I Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Target TW I 2025	Realisasi TW I	Capaian (%)
1	Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Tata Kelola Keuangan, Arsip, Ketatausahaan, Kerumahtanggaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara, serta Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus yang Baik					
	1.1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	BAIK (89 ≤ skor IKPA < 95)	Nilai diukur tahunan	Nilai Progres; (100) "SANGAT BAIK"	100%
2	Sasaran Kegiatan 2. Terwujudnya Layanan Umum dan Keuangan dalam Dukungan Manajemen yang Berkualitas					
	2.1 Indeks Kepuasan Layanan Biro Umum dan Keuangan	Indeks	3.1 (skala 4)	Nilai diukur tahunan	3.1 (skala 4)	100%
3	Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya Koordinasi Keuangan, Arsip, Ketatausahaan, Kerumahtanggaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara, serta Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus yang Efektif					
	3.1 Nilai Kesesuaian Rencana Penarikan Dana dan Realisasi	Nilai	80	Nilai diukur tahunan	100	100%

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Target TW I 2025	Realisasi TW I	Capaian (%)
	Anggaran Biro Umum dan Keuangan					
4	Sasaran Kegiatan 4. Terwujudnya Tata Kelola di Unit Biro Umum dan Keuangan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus yang Baik					
	4.1 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Biro Umum dan Keuangan	Persentase	95%	95%	100%	100%

Kinerja Biro Umum dan Keuangan selama Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1	Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Tata Kelola Keuangan, Arsip, Ketatausahaan, Kerumahtanggaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara, serta Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus yang Baik
----------	--

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1, yaitu terwujudnya tata kelola keuangan, arsip, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan pengelolaan barang milik negara, serta pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK yang baik, yang dapat ditunjukkan dengan nilai indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Latar Belakang

Layanan umum dan keuangan dalam dukungan manajemen yang berkualitas merupakan kondisi yang diharapkan dapat terwujud sebagai hasil akhir dari pelaksanaan kegiatan pada Biro Umum dan Keuangan yang memiliki tugas fungsi sebagai unit yang melaksanakan tata kelola keuangan, arsip, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan pengelolaan barang milik negara, serta pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK. Pemenuhan dan fasilitasi layanan umum dapat menunjang dan membantu dalam hal pencapaian kinerja unit kerja sehingga berpengaruh dalam pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan.

Hasil Pengukuran Kinerja

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan indikator yang dikeluarkan Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN), yang terdiri dari 8 (delapan) indikator yang digunakan sebagai alat monitor & evaluasi serta basis penilaian IKPA.

Capaian IKU 1.1 ditunjukkan oleh kategori nilai atas skor penilaian kinerja pelaksanaan anggaran yang terdiri atas 3 (tiga) aspek dengan rincian indikator pada setiap aspeknya sebagai berikut:

- a. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran (Bobot 25%)
 1. Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (10%)
 2. Deviasi Hal III DIPA (15%)
- b. Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran (Bobot 50%)
 3. Penyerapan Anggaran (20%)
 4. Belanja Kontraktual (10%)
 5. Penyelesaian Tagihan (10%)
 6. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) (10%)
 7. Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM) (pengurang Nilai IKPA)
- c. Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (Bobot 25%)
 8. Capaian Output (25%)

Adapun Kategori Nilai IKPA adalah sebagai berikut :

Skor IKPA \geq 95	= Sangat Baik
89 \leq skor IKPA < 95	= Baik
70 \leq skor IKPA < 89	= Cukup
Skor IKPA < 70	= Kurang

Laporan hasil skor IKPA disajikan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui Laporan Hasil IKPA pada Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN).

IKPA pada tahun 2025 ditargetkan dapat mencapai predikat “BAIK” dimana dapat diraih dengan skor IKPA 89 s.d. 95 dan hanya memiliki target tahunan tanpa ada target per triwulan.

Sebagaimana diperoleh dari hasil monitoring OM-SPAN pada menu Monev Pelaksanaan Anggaran (PA) dan sub menu Indikator Pelaksanaan Anggaran, hingga Triwulan I Tahun 2025, skor Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran sementara mencapai skor 100, yang mana masuk predikat “SANGAT BAIK” dari target Tahun 2025 dengan predikat “BAIK” dengan ringkasan pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Pengukuran Kinerja IKU 1.1

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.1 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	BAIK	SANGAT BAIK	100%

Target tahunan IKU 1.1 dengan penilaian IKPA untuk tahun 2025 yaitu predikat “BAIK” dengan skor IKPA 89 s.d. 95. Jenis *cascading* IKU ini tergolong dalam jenis *non-cascading*. Pelaporan IKU memiliki polarisasi indikator kinerja yang *maximize* (makin tinggi realisasi terhadap target, makin baik capaian kinerjanya). Nilai kinerja

pelaksanaan anggaran K/L Tahun 2025 dengan periode pelaporan tahunan dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir). Skor sementara pada Triwulan I Tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan Target Tahun 2025. Hal ini disebabkan adanya penyesuaian data dan perhitungan Indikator IKPA Triwulan I Tahun 2025 dengan nomor surat S-461/KPN.1202/2025 point 3 terkait penyesuaian data dan perhitungan penilaian dengan memberikan nilai 100 untuk seluruh indikator penilaian IKPA selama Triwulan I Tahun 2025. Hal ini sangat berdampak pada nilai IKPA sementara karena nilai keseluruhan IKPA menjadi "SANGAT BAIK".

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Indikator kinerja ini secara lebih lanjut bertujuan untuk melakukan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja IKPA. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I Tahun 2025 dengan ringkasan pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Rencana Aksi IKU 1.1 Triwulan I Tahun 2025

No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Penyelenggaraan asistensi dan koordinasi monitoring evaluasi pelaksanaan anggaran periode TW I 2025.	Terlaksana	Monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran akan terus dilaksanakan secara triwulanan
2	Sosialisasi langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2025.	Terlaksana	Peningkatan kompetensi pejabat perbendaharaan dan pengelola keuangan dilaksanakan secara kontinu

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Pelaporan proyeksi target dan realisasi Capaian Output Triwulan I 2025
- b. Melakukan pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) Halaman III DIPA Triwulan I Tahun Anggaran 2025.
- c. Pengisian Realisasi Kinerja Capaian Output ke Emonev Bappenas dan Aplikasi SAKTI

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I Tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya, utamanya adalah efisiensi penggunaan anggaran. Pagu anggaran kegiatan Peningkatan dan Pengelolaan Layanan Umum dan Keuangan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK adalah sebesar Rp31.558.626.000 dan terblokir sebanyak Rp3.378.340.000, sehingga pagu anggaran setelah blokir menjadi sebesar Rp28.180.286.000. Hingga Triwulan I Tahun 2025 telah terealisasi sebesar

Rp18.305.286.159, atau sebesar 58,00% dari total pagu anggaran sebelum blokir, atau sebesar 64,95% dari total pagu anggaran setelah blokir.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, pelaksanaan kinerja anggaran pada Biro Umum dan Keuangan masih menghadapi sejumlah kendala dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa kendala yang diidentifikasi antara lain:

- a. Diperkirakan terdapat deviasi yang cukup signifikan, namun karena adanya penyesuaian data dan perhitungan Indikator IKPA Triwulan I Tahun 2025, skor kinerja tetap menunjukkan angka 100.
- b. Terdapat kendala dalam penyusunan rencana penarikan dana secara akurat dan tepat waktu.
- c. Pelaksanaan kegiatan mengalami hambatan akibat penerapan kebijakan efisiensi anggaran.

Upaya perbaikan terhadap kendala tersebut yaitu melalui penyesuaian rencana penarikan dana triwulanan dan pelaksanaan kegiatan yang adaptif dan responsif atas kebijakan efisiensi anggaran, guna memastikan ketercapaian target kinerja secara optimal.

2

Sasaran Kegiatan 2: Terwujudnya Layanan Umum dan Keuangan dalam Dukungan Manajemen yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2 adalah terwujudnya layanan umum dan keuangan dalam dukungan manajemen yang berkualitas, yang dapat ditunjukkan dengan indikator Indeks Kepuasan Layanan Biro Umum dan Keuangan.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 Indeks
Kepuasan
Layanan
Biro Umum
dan
Keuangan

Latar Belakang

Layanan umum dan keuangan dalam dukungan manajemen yang berkualitas merupakan kondisi yang diharapkan dapat terwujud sebagai hasil akhir dari pelaksanaan kegiatan pada Biro Umum dan Keuangan yang memiliki tugas fungsi sebagai unit yang melaksanakan tata kelola keuangan, arsip, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan pengelolaan barang milik negara, serta pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK. Pemenuhan dan fasilitasi layanan umum dapat menunjang dan membantu dalam hal pencapaian kinerja unit kerja sehingga berpengaruh dalam pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan.

Hasil Pengukuran Kinerja

Indeks kepuasan layanan Biro Umum dan Keuangan mengukur indikator tingkat kepuasan pelayanan Biro Umum dan Keuangan dengan melakukan survei pelayanan ke unit organisasi lainnya di

lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK. Daftar pertanyaan survei terdiri atas beberapa pertanyaan berupa jenis layanan perencanaan dan output dari peningkatan yang dihasilkan, dengan 5 (lima) kriteria penilaian, serta tambahan form untuk penulisan saran. Jumlah responden dipilih secara acak/*random*, dan berasal dari unit kerja selain Biro Umum dan Keuangan.

Nilai indeks diperoleh dari nilai rata rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan lima kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas (4) Sangat Puas.

Pengukuran indikator tingkat kepuasan layanan Umum dan Keuangan dengan melakukan survei pelayanan ke unit organisasi lainnya di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK. Adapun formulasi perhitungan indeks kepuasan adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Nilai Kepuasan: Rerata Jawaban dari Masing-masing Item Survei / Jumlah Item Survei

Setelah diperoleh nilai kepuasan maka dibanding ke dalam skala kategori penilaian

- a. Sangat Puas (4), rentang nilai 3.51 – 4
- b. Puas (3), rentang nilai 3.01 – 3.50
- c. Tidak Puas (2), rentang nilai 2.51 – 3.00
- d. Sangat tidak puas (1), rentang nilai < 2.50

Tabel 4. Hasil Pengukuran Kinerja IKU 2.1

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.1 Indeks Kepuasan Layanan Biro Umum dan Keuangan	Indeks	3,1 (Skala 4)	3,1	100%

Target kinerja pada Triwulan I tahun 2025 yaitu Indeks Kepuasan Layanan Biro Umum dan Keuangan. Jenis cascading IKU ini tergolong dalam jenis *cascading* peta dengan metode *direct cascading*. Pelaporan IKU memiliki polarisasi indikator kinerja yang *maximize* (makin tinggi realisasi terhadap target, makin baik capaian kinerjanya). Penilaian tersebut dilakukan setiap akhir tahun dengan melakukan survei sehingga target triwulan tidak ditetapkan. Tetapi pelaksanaan pelayanan umum tetap berjalan dengan baik dan berkesinambungan. Target tersebut ditetapkan berdasarkan tren penilaian kepuasan layanan umum di rentang angka 3,1 (tiga koma satu).

Berdasarkan Tabel 4, Hingga Triwulan I Tahun 2025, Indeks Kepuasan Layanan Umum tidak dapat diukur karena survei kepuasan layanan umum diukur setiap tahun yang dinilai oleh seluruh Biro di Sekretariat Jenderal KEK. Jika ditarik dari skor Layanan Dukungan Manajemen Internal pada periode penilaian sebelumnya, maka Indeks Kepuasan Layanan Umum adalah sebesar 3,1 (tiga koma satu).

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2025 sebagaimana Tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5. Rencana Aksi IKU 2.1 Triwulan I Tahun 2025

No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Peningkatan layanan persuratan dan tata naskah dinas.	Terlaksana	Pelayanan persuratan dan tata naskah dinas telah ditingkatkan melalui implementasi sistem digitalisasi arsip dan optimalisasi aplikasi persuratan elektronik. Hal ini mempermudah proses administrasi surat masuk/keluar dan meningkatkan efisiensi koordinasi antar unit kerja.
2	Optimalisasi layanan kerumahtanggaan.	Terlaksana	Optimalisasi dilakukan dengan memfasilitasi dan menyediakan kebutuhan logistik perkantoran sesuai kebutuhan tiap Biro, dengan memperhatikan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Monitoring harian diterapkan untuk memastikan ketersediaan dan kualitas layanan yang mendukung kenyamanan kerja seluruh pegawai.
3	Peningkatan layanan sarana dan prasarana perkantoran.	Terlaksana	Peningkatan layanan sarana dan prasarana kantor telah dilaksanakan dengan melakukan pengadaan perangkat kerja tambahan untuk memenuhi kebutuhan unit kerja, meningkatkan produktivitas, dan menunjang efektivitas operasional.
4	Peningkatan layanan penyelesaian tagihan dan pelaksanaan anggaran.	Terlaksana	Biro Umum dan Keuangan telah melaksanakan kegiatan penyelesaian tagihan dan pelaksanaan anggaran selama Januari s.d Maret 2025
5	Peningkatan layanan pengadaan barang/jasa.	Terlaksana	Peningkatan layanan pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan memastikan pengadaan barang sesuai kebutuhan kantor
6	Peningkatan layanan persidangan.	Terlaksana	Dukungan teknis dan logistik untuk penyelenggaraan sidang telah dilaksanakan dengan baik, termasuk penyediaan peralatan, konsumsi, dan penjadwalan ruang sidang. Hal ini mendukung kelancaran kegiatan sidang dan kepuasan peserta sidang terhadap layanan yang diberikan.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah dengan membuka layanan konsultasi/pendampingan kepada seluruh unit kerja dalam rangka penyelesaian permasalahan perbendaharaan dan pertanggungjawaban anggaran.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I Tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya, utamanya adalah efisiensi penggunaan anggaran. Pagu anggaran kegiatan Peningkatan dan Pengelolaan Layanan Umum dan Keuangan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK adalah sebesar Rp31.558.626.000 dan terblokir sebanyak Rp3.378.340.000, sehingga pagu anggaran setelah blokir menjadi sebesar Rp28.180.286.000. Hingga Triwulan I Tahun 2025 telah berhasil terealisasi sebesar Rp18.305.286.159, atau sebesar 58,00% dari total pagu anggaran sebelum blokir, atau sebesar 64,95% dari total pagu anggaran setelah blokir.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, pelaksanaan kinerja anggaran pada Biro Umum dan Keuangan masih menghadapi sejumlah kendala dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa kendala yang diidentifikasi antara lain:

- a. Diperkirakan terdapat deviasi yang cukup signifikan, namun karena adanya penyesuaian data dan perhitungan Indikator IKPA Triwulan I Tahun 2025, skor kinerja tetap menunjukkan angka 100.
- b. Terdapat kendala dalam penyusunan rencana penarikan dana secara akurat dan tepat waktu.
- c. Pelaksanaan kegiatan mengalami hambatan akibat penerapan kebijakan efisiensi anggaran.

Upaya perbaikan terhadap kendala tersebut yaitu melalui penyesuaian rencana penarikan dana triwulanan dan pelaksanaan kegiatan yang adaptif dan responsif atas kebijakan efisiensi anggaran, guna memastikan ketercapaian target kinerja secara optimal.

3

Sasaran Kegiatan 3: Terwujudnya Koordinasi Keuangan, Arsip, Ketatausahaan, Kerumahtanggaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara, serta Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus yang Efektif

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3 adalah terwujudnya koordinasi keuangan, arsip, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan pengelolaan Barang Milik Negara, serta pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK yang efektif, yang dapat ditunjukkan dengan nilai kesesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) dan Realisasi Anggaran Biro Umum dan Keuangan. Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Latar Belakang

Untuk mendorong pencapaian pada *perspective internal business process* dengan sasaran mewujudkan tata kelola keuangan, arsip, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan pengelolaan barang milik negara, serta pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK yang baik, maka diperlukan koordinasi keuangan, arsip, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan pengelolaan barang milik negara, serta pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK yang efektif.

Koordinasi keuangan, arsip, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan pengelolaan barang milik negara, serta pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK membantu pencapaian kinerja organisasi yang efektif dan efisien serta akuntabel.

Hasil Pengukuran Kinerja

Nilai kesesuaian rencana penarikan dana dan realisasi anggaran Biro Umum dan Keuangan dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan pada setiap jenis belanja (JB) dengan memperhatikan pagu masing-masing JB.

Ambang batas rata-rata deviasi bulanan sebesar 5,0% untuk memperoleh nilai maksimal (100):

Rentang deviasi 0 – 5,0% Nilainya 100, sedangkan rentang deviasi > 5,0% nilai indikatornya 0 – 95,0 (sesuai persentase deviasi).

Menggunakan deviasi tertimbang berdasarkan bobot/persentase pagu per JB:

- Deviasi DIPA per JB bulanan = ((realisasi bulanan – RPD bulanan)/RPD bulanan) x (Pagu per JB/ Total Pagu)
- Nilai deviasi Seluruh JB (Deviasi DIPA Tertimbang) = Deviasi DIPA JB 51 + 52 + 53
- Persentase Kesesuaian RPD dan Realisasi Anggaran = 100% - (Akumulasi Deviasi DIPA Tertimbang / n)

Laporan hasil skor Rencana Penarikan Dana dan Realisasi Anggaran Biro Umum dan Keuangan disajikan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui Laporan Hasil IKPA, pada kolom Kualitas Perencanaan Anggaran, Deviasi Halaman III DIPA pada Aplikasi Online Monitoring OM-SPAN.

Rencana Penarikan Dana dan Realisasi Anggaran Biro Umum dan Keuangan pada tahun 2025 ditargetkan dapat mencapai nilai 80 dan hanya memiliki target tahunan tanpa ada target per triwulan.

Sebagaimana diperoleh dari hasil monitoring OM-SPAN pada menu Monev PA dan sub menu Indikator Pelaksanaan Anggaran, hingga Triwulan I Tahun 2025, nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran sementara mencapai nilai 100, dari target Tahun 2025 dengan skor dengan ringkasan pada Tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Pengukuran Kinerja IKU 3.1

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.1 Nilai Kesesuaian Rencana Penarikan Dana dan Realisasi Anggaran Biro Umum dan Keuangan	Nilai	80	100	100%

Target tahunan IKU Nilai Kesesuaian Rencana Penarikan Dana dan Realisasi Anggaran Biro Umum dan Keuangan untuk tahun 2025 yaitu nilai skor 80 (delapan puluh). Jenis *cascading* IKU ini tergolong dalam jenis *non-cascading*. Pelaporan IKU memiliki polarisasi indikator kinerja yang Maximize (makin tinggi realisasi terhadap target, makin baik capaian kinerjanya). Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L Tahun 2025 dengan periode pelaporan tahunan dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir). Skor sementara pada Triwulan I Tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan target tahun 2025. Hal ini disebabkan adanya penyesuaian data dan perhitungan Indikator IKPA Triwulan I Tahun 2025 dengan nomor surat S-461/KPN.1202/2025 point 3 terkait penyesuaian data dan perhitungan penilaian dengan memberikan nilai 100 untuk seluruh indikator penilaian IKPA selama Triwulan I Tahun 2025. Hal ini sangat berdampak pada nilai kesesuaian Rencana Penarikan Dana dan Realisasi Anggaran sementara karena nilai Halaman III DIPA menjadi 100 (seratus).

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 7. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2025

No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan kegiatan TW I.	Terlaksana	Kegiatan yang direncanakan dalam Triwulan I telah dilaksanakan secara optimal dan tepat waktu.
2	Mempercepat pertanggungjawaban sesuai target rencana penarikan dana.	Terlaksana	Proses penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dilakukan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I Tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya, utamanya adalah efisiensi penggunaan anggaran. Pagu anggaran

kegiatan Peningkatan dan Pengelolaan Layanan Umum dan Keuangan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK adalah sebesar Rp31.558.626.000 dan terblokir sebanyak Rp3.378.340.000, sehingga pagu anggaran setelah blokir menjadi sebesar Rp28.180.286.000. Hingga Triwulan I Tahun 2025 telah berhasil terealisasi sebesar Rp18.305.286.159, atau sebesar 58,00% dari total pagu anggaran sebelum blokir, atau sebesar 64,95% dari total pagu anggaran setelah blokir.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, pelaksanaan kinerja anggaran pada Biro Umum dan Keuangan masih menghadapi sejumlah kendala dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa kendala yang diidentifikasi antara lain:

- a. Diperkirakan terdapat deviasi yang cukup signifikan, namun karena adanya penyesuaian data dan perhitungan Indikator IKPA Triwulan I Tahun 2025, skor kinerja tetap menunjukkan angka 100.
- b. Terdapat kendala dalam penyusunan rencana penarikan dana secara akurat dan tepat waktu.
- c. Pelaksanaan kegiatan mengalami hambatan akibat penerapan kebijakan efisiensi anggaran.

Upaya perbaikan terhadap kendala tersebut yaitu melalui penyesuaian rencana penarikan dana triwulanan dan pelaksanaan kegiatan yang adaptif dan responsif atas kebijakan efisiensi anggaran, guna memastikan ketercapaian target kinerja secara optimal.

4

Sasaran Kegiatan 4: Terwujudnya Tata Kelola di Unit Biro Umum dan Keuangan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus yang Baik

Pencapaian Sasaran Kegiatan 4 adalah terwujudnya tata kelola di unit Biro Umum dan Keuangan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK yang Baik, yang dapat ditunjukkan dengan persentase kualitas pelaksanaan anggaran Biro Umum dan Keuangan.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Biro Umum dan Keuangan

Latar Belakang

Kualitas kinerja pelaksanaan anggaran di Biro Umum dan Keuangan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK merupakan indikator penting dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Pelaksanaan anggaran yang berkualitas memerlukan perencanaan yang matang, pengelolaan yang akuntabel, dan pelaksanaan yang efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap kinerja pelaksanaan anggaran mencakup ketepatan waktu, akurasi realisasi anggaran, serta kesesuaian dengan program yang direncanakan, yang berfungsi sebagai alat evaluasi sekaligus dasar untuk perbaikan

berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel, peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran diharapkan dapat mendukung tata kelola keuangan yang baik dan mewujudkan akuntabilitas publik.

Hasil Pengukuran Kinerja

Persentase kualitas pelaksanaan anggaran merupakan indikator yang ditetapkan untuk menggambarkan kualitas pelaksanaan anggaran belanja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, dan penggunaan belanja secara proporsional. Persentase penyelesaian ini bertujuan untuk melakukan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran, yang dihitung dalam sebuah formula perhitungan berikut:

Formula:

Realisasi IKU-4.1= % Realisasi Anggaran + % Pencapaian Output

- % Realisasi Anggaran = (% Penyerapan Anggaran : %Target Penyerapan Anggaran) x 50%
- Pencapaian Output = (% Realisasi Output : % Target Output) x 50%

Target tahunan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Biro Umum dan Keuangan untuk tahun 2025 yaitu nilai persentase 95% (sembilan puluh lima persen). Jenis *cascading* IKU ini tergolong dalam jenis *cascading peta*. Pelaporan IKU memiliki polarisasi indikator kinerja yang Maximize (makin tinggi realisasi terhadap target, makin baik capaian kinerjanya). Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L Tahun 2025, periode pelaporan triwulanan dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *sum*. Skor pada Triwulan I Tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan target tahun 2025.

Tabel 8. Hasil Pengukuran Kinerja IKU 4.1

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi TW I	% Kinerja
IKU-4.1 Persentase Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Biro Umum dan Keuangan	persentase	95%	100%	100%

Untuk mendapatkan nilai persentase Target Penyerapan Anggaran, dapat dihitung dengan mencari nilai target serapan anggaran dan proporsi pagu anggaran.

Tabel 9. Nilai Target Serapan Anggaran dan Proporsi Pagu Anggaran

Target Serapan Anggaran	Nilai %	Proporsi Pagu Anggaran	Nilai %
JB 51	15	JB 51	20.36
JB 52	10	JB 52	76.56
JB 53	5	JB 53	3.07

Penyerapan Anggaran didapat dari aplikasi OM-SPAN sebesar 44,86%

Target Penyerapan Anggaran sebesar 10,86% didapatkan dari rata-rata tertimbang target serapan anggaran semua jenis belanja, dengan perhitungan sebagai berikut :

- Didapatkan target penyerapan tertimbang yaitu sebesar = $(15 \times 20.36) + (10 \times 76.56) + (5 \times 3.07) = 10,86\%$

Sehingga, Realisasi Anggaran dapat dihitung sebagaimana berikut:

Realisasi Anggaran = $(\% \text{ Penyerapan Anggaran} : \% \text{Target Penyerapan Anggaran}) \times 50\%$

Realisasi Anggaran = $(44,86\% : 10,86\%) \times 50\%$

Realisasi Anggaran = $100\% \times 50\%$ (data diambil dari aplikasi OM-SPAN, jika melebihi target, tetap ditampilkan 100)

Realisasi Anggaran = 50%

Untuk perhitungan Pencapaian Output yaitu sebagai berikut:

Pencapaian Output = $(\% \text{ Realisasi Output} : \% \text{ Target Output}) \times 50\%$

Pencapaian Output = $(100\% : 100\%) \times 50\%$

Pencapaian Output = 50% (data diambil dari aplikasi OM-SPAN, jika melebihi target, tetap ditampilkan 100)

Maka Realisasi IKU = 50% + 50% = 100%

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Indikator kinerja ini secara lebih lanjut bertujuan untuk melakukan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 10. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2025

No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Menyusun rencana kegiatan dan belanja.	Terlaksana	Rencana Kegiatan dan Rencana Belanja telah disusun sesuai rencana
2	Mengidentifikasi ruang lingkup output yang diharapkan	Terlaksana	Tidak terdapat kendala
3	Menyusun strategi capaian output.	Terlaksana	Strategi capaian output telah disusun
4	Pelaporan E-Monev.	Terlaksana	Pelaporan dilakukan rutin pada 2 hari kerja pertama setiap bulan

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I Tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya, utamanya adalah efisiensi penggunaan anggaran. Pagu anggaran kegiatan Peningkatan dan Pengelolaan Layanan Umum dan Keuangan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK adalah sebesar

Rp31.558.626.000 dan terblokir sebanyak Rp3.378.340.000, sehingga pagu anggaran setelah blokir menjadi sebesar Rp28.180.286.000. Hingga Triwulan I Tahun 2025 telah berhasil terealisasi sebesar Rp18.305.286.159, atau sebesar 58,00% dari total pagu anggaran sebelum blokir, atau sebesar 64,95% dari total pagu anggaran setelah blokir.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, pelaksanaan kinerja anggaran pada Biro Umum dan Keuangan masih menghadapi sejumlah kendala dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa kendala yang diidentifikasi antara lain:

- a. Diperkirakan terdapat deviasi yang cukup signifikan, namun karena adanya penyesuaian data dan perhitungan Indikator IKPA Triwulan I Tahun 2025, skor kinerja tetap menunjukkan angka 100.
- b. Terdapat kendala dalam penyusunan rencana penarikan dana secara akurat dan tepat waktu.
- c. Pelaksanaan kegiatan mengalami hambatan akibat penerapan kebijakan efisiensi anggaran.

Upaya perbaikan terhadap kendala tersebut yaitu melalui penyesuaian rencana penarikan dana triwulanan dan pelaksanaan kegiatan yang adaptif dan responsif atas kebijakan efisiensi anggaran, guna memastikan ketercapaian target kinerja secara optimal.

Jakarta, 9 Juli 2025
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Sunoto Setyo
NIP. 197112301999031001